

Analisis Faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015

Chikara Amadhea T¹

¹Universitas Tidar

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 30, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 02, 2025

Keywords

Local Original Income, Inflation,
Government Expenditure, Population,
Central Java



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

The main objective of this study is to evaluate and examine the factors that influence Local Original Income (PAD) in six cities in Central Java Province. In this study, the independent variables analyzed include the inflation rate, government spending, and population. Meanwhile, the variable that is used as the main focus or dependent variable is PAD. The data used is secondary data obtained from the official publication of the Central Statistics Agency (BPS), covering the time period from 2010 to 2015. This study involved six cities as objects of analysis, namely Semarang City, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan, and Tegal. To analyze the relationship between variables, the panel data regression method was used which was run with the help of EViews version 9 software. The results of the analysis showed that the population variable had a positive and significant effect on increasing PAD. The same thing was also found in the government spending variable, which was proven to provide a positive and significant contribution to PAD growth. Conversely, the inflation variable showed a negative and insignificant effect on PAD in the six cities during the study period.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, variabel independen yang dianalisis mencakup tingkat inflasi, belanja pemerintah, serta jumlah penduduk. Sementara itu, variabel yang dijadikan sebagai fokus utama atau variabel dependen adalah PAD. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), mencakup periode waktu dari tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini melibatkan enam kota sebagai objek analisis, yaitu Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal. Untuk menganalisis hubungan antar variabel, digunakan metode regresi panel data yang dijalankan dengan bantuan software EViews versi 9. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal yang sama juga ditemukan pada variabel pengeluaran pemerintah, yang terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan PAD. Sebaliknya, variabel inflasi menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD di keenam kota tersebut selama periode penelitian berlangsung.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kontribusi pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan di wilayahnya. Pemberian otonomi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendukung pemerintah pusat dalam mengelola pemerintahan serta melaksanakan pembangunan di tingkat daerah. Untuk menjalankan pembangunan dan menyediakan layanan publik, dibutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar. Hal ini sejalan dengan pandangan Basri (2002) yang menekankan bahwa pembiayaan merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Tanpa keseimbangan antara tanggung jawab yang diberikan dan dukungan pendanaan, makna dari otonomi itu sendiri menjadi tidak terarah.

Pembangunan di daerah sangat bergantung pada tingkat kemandirian fiskal, di mana peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi aspek krusial. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya, khususnya dalam menggali serta mengelola potensi dan sumber daya lokal secara optimal. Pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam menangani urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Hal ini

sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah adalah proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin rendah ketergantungan daerah tersebut terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Dalam Undang-Undang tersebut, PAD mencakup sumber-sumber penerimaan seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan sah lainnya. Besaran PAD yang masuk ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan sejauh mana daerah dapat membiayai kebutuhannya sendiri. Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi peningkatan PAD adalah tingkat inflasi. Ketika inflasi naik, penerimaan dari pajak dan retribusi—khususnya yang pengenaannya berdasarkan omzet, seperti pajak pembangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)—juga berpotensi mengalami kenaikan.

Faktor selanjutnya yang turut memengaruhi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk tidak seharusnya dianggap sebagai beban, melainkan sebagai aset yang berperan strategis dalam mendorong pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana disampaikan oleh Gde Bhaskara dan A.A Bagus (2014). Peningkatan populasi justru dapat menjadi motor penggerak aktivitas ekonomi. Sementara itu, faktor ketiga yang berkontribusi terhadap PAD adalah belanja pemerintah, yang merepresentasikan arah kebijakan fiskal. Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran tersebut mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Besarnya alokasi anggaran belanja ini dapat dijadikan indikator tingkat aktivitas pemerintahan yang didanai dari anggaran publik.

Semakin banyak program dan aktivitas pemerintah, maka semakin besar pula belanja negara atau daerah yang dikeluarkan. Menurut Mangkoesoebroto (1998), proporsi pengeluaran pemerintah terhadap Produk Nasional Bruto (GNP) pada tahun 2010 hingga 2015 menjadi ukuran penting untuk melihat sejauh mana aktivitas ekonomi pemerintah dalam perekonomian nasional. Faktor keempat yang berperan adalah investasi. Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki wilayah seluas 32.801 km², merupakan salah satu provinsi yang berperan penting di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, provinsi ini terus mengupayakan pencapaian struktur daerah yang ideal dan dinamis melalui pendekatan sistem yang terintegrasi.

Selain memiliki posisi geografis yang strategis dibandingkan dengan wilayah lainnya, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki sumber daya alam dan manusia yang potensial untuk mendorong pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah. Data pada Tabel 1 menggambarkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota-kota di Jawa Tengah selama periode 2010 hingga 2015. Tabel tersebut menunjukkan adanya variasi besaran PAD antar kota, serta perbedaan kontribusi masing-masing kota terhadap total PAD Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya. Pada tahun 2015, Kota Semarang tercatat sebagai kota dengan kontribusi tertinggi, yaitu sebesar Rp1.201.580.015.616, disusul oleh Kota Surakarta dengan Rp372.797.997.056. Secara umum, PAD di setiap kota tahun 2010-2015 mengalami peningkatan.

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015
(Milyar Rupiah)

Tahun	PAD KOTA DI JAWA TENGAH (MILYAR RUPIAH)					
	SEMARANG	PEKALONGAN	SALATIGA	TEGAL	MAGELANG	SURAKARTA
2010	327.992.246.272	47.495.708.672	51.549.749.248	101.321.867.264	59.548.102.656	113.946.009.000
2011	521.538.011.136	63.344.975.872	60.611.338.240	117.244.002.304	63.557.701.632	181.097.002.000
2012	779.616.976.896	91.205.787.648	77.798.866.944	156.663.005.184	91.314.601.984	231.672.004.000
2013	925.919.019.008	114.251.997.184	106.099.998.720	176.377.004.032	107.740.000.000	298.401.002.000
2014	1.138.370.019.328	144.065.003.520	165.747.998,72	241.936.007.168	164.928.000.000	335.659.990.000
2015	1.201.580.015.616	152.044.994.560	167.010.992.128	271.600.992.256	186.677.000.000	372.797.997.000

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah

Penelitian ini merupakan perluasan dari studi yang pernah dilakukan oleh Hening Fitria Sarasati El Rani berjudul *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2005–2014*. Perbedaan mendasar antara kedua

penelitian ini terletak pada wilayah kajian. Jika penelitian El Rani terbatas pada Kabupaten/Kota di lingkup Eks-Karesidenan Pekalongan, maka penelitian ini mencakup kota-kota di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu perbedaan lainnya adalah pada variabel yang diteliti. El Rani menitikberatkan pengeluaran pemerintah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta jumlah penduduk dalam mempengaruhi PAD. Adapun dalam penelitian ini, variabel yang dianalisis diperluas dengan memasukkan faktor inflasi dan investasi sebagai variabel tambahan yang diasumsikan turut memengaruhi tingkat Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kota-kota di Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu inflasi, belanja pemerintah daerah, dan jumlah penduduk. Selain itu penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor tersebut berkontribusi terhadap pencapaian realisasi PAD di kota-kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010 hingga 2015.

TINJAUAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama Pasal 1 ayat 18, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang diperoleh pemerintah daerah melalui mekanisme pemungutan yang diatur oleh peraturan daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa PAD mencerminkan kekayaan atau hak finansial daerah dalam periode satu tahun yang tercatat sebagai penambah nilai aset bersih daerah. Sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas dana transfer dari pemerintah pusat, PAD itu sendiri, serta penerimaan sah lainnya. Menurut pandangan Widjaja (1992), PAD memiliki peran strategis sebagai salah satu komponen utama dalam menopang pembiayaan pembangunan dan memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah. Secara umum, PAD terdiri atas beberapa elemen pokok, yaitu:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
Jenis-jenis Retribusi Daerah:
 - a) Retribusi Jasa Umum
 - b) Retribusi Jasa Usaha
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Pendapatan Lain yang Sah

Jumlah Penduduk (Population)

Jumlah penduduk mengacu pada seseorang yang resmi tinggal dan mematuhi peraturan di wilayah tersebut. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana adanya peningkatan jumlah penduduk dapat berpotensi meningkatkan pendapatan (Simanjuntak, 2011). Anata (2008) mendefinisikan penduduk Indonesia adalah orang yang menetap di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan, atau kurang dari itu tetapi memiliki keinginan untuk menetap. Penelitian oleh Adriani dan Handayani (2008) meneliti pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sementara jumlah penduduk secara parsial justru tidak berpengaruh signifikan dan cenderung negatif. Namun, apabila dianalisis secara bersamaan, kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD dengan korelasi yang cukup kuat antara keduanya.

Pengeluaran Pemerintah (GE)

Menurut Mangkoesoebroto (1998), pengeluaran pemerintah merepresentasikan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya saat pemerintah memutuskan untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Jumlah dana yang dikeluarkan mencerminkan besarnya biaya yang dibutuhkan guna merealisasikan suatu kebijakan. Di sisi lain, Sukirno (2004) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan bagian integral dari kebijakan fiskal yang menggambarkan upaya pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui perencanaan anggaran tahunan, baik di tingkat nasional melalui APBN maupun di tingkat daerah melalui APBD. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur belanja daerah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merujuk pada jenis pengeluaran yang tidak secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan spesifik. Beberapa contoh dari kategori ini meliputi:

- a. **Belanja Pegawai:** mencakup gaji, tunjangan, dan kompensasi lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. **Belanja Bunga:** digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai nilai pokok utang yang masih tersisa.
- c. **Belanja Subsidi:** dialokasikan untuk mendukung biaya produksi lembaga atau perusahaan tertentu agar harga produk/jasa yang ditawarkan tetap terjangkau.
- d. **Belanja Hibah:** berupa pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah daerah lain, kelompok masyarakat, atau individu yang telah ditetapkan.
- e. **Belanja Bantuan Sosial:** diperuntukkan bagi masyarakat dalam bentuk uang atau barang, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- f. **Belanja Bagi Hasil:** dialokasikan sebagai pembagian pendapatan dari provinsi kepada kabupaten/kota, atau dari kabupaten/kota ke desa, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- g. **Bantuan Keuangan:** berbentuk dukungan keuangan dari provinsi ke kabupaten/kota atau sebaliknya, termasuk antar pemerintah daerah, untuk pemerataan dan peningkatan kapasitas fiskal.
- h. **Belanja Tidak Terduga:** digunakan untuk keperluan yang sifatnya mendesak dan tidak terprediksi, seperti penanggulangan bencana alam atau sosial, serta pengembalian kelebihan penerimaan anggaran dari tahun sebelumnya.

Kelompok belanja langsung merupakan jenis pengeluaran yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pengeluaran ini dialokasikan untuk mendukung pencapaian hasil dari program yang telah direncanakan. Jenis-jenis belanja langsung mencakup:

- a. **Belanja Pegawai:** digunakan untuk membiayai honorarium atau upah tenaga kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
- b. **Belanja Modal:** dialokasikan untuk pengeluaran terkait pengadaan, pembangunan, atau peningkatan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
- c. **Belanja Barang dan Jasa:** digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa yang memiliki manfaat jangka pendek (kurang dari 12 bulan) untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Inflasi

Inflasi menggambarkan kondisi melemahnya daya beli masyarakat yang disertai dengan penurunan nilai riil atau intrinsik dari mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000). Dalam perspektif klasik sebagaimana dikutip oleh Keynes (dalam Mankiw, 2006), inflasi diartikan sebagai peningkatan tingkat harga secara umum. Harga sendiri merupakan ukuran nilai tukar atas barang dan jasa. Teori yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (dalam Mangkoesoebroto, 1998) memandang inflasi sebagai konsekuensi dari gejolak sosial. Dalam konteks tersebut, pajak dianggap sebagai instrumen yang efektif untuk merespons ketidakstabilan sosial, termasuk kondisi darurat seperti peperangan dan meningkatnya jumlah anak yatim piatu. Dalam situasi demikian, pemerintah menggunakan anggaran publik, yang bersumber dari penerimaan pajak, untuk membiayai program-program penanganan krisis sosial. Oleh karena itu, pajak berperan penting dalam mendukung stabilitas fiskal dan sosial melalui pembiayaan pengeluaran negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) di enam kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

Jenis dan sumber data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah untuk rentang waktu 2010 hingga 2015. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yakni gabungan antara data deret waktu (time series) dan data lintas wilayah (cross section). Variabel-variabel yang diteliti mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, serta tingkat inflasi selama periode yang dimaksud.

Variabel Penelitian

Pada penelitian ini variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010–2015 digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan untuk variabel independennya adalah:

- X1 = Jumlah Penduduk
- X2 = Pengeluaran Pemerintah
- X3 = Inflasi

Analisis Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dan diuji menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji asumsi klasik.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi yang digunakan adalah regresi linier berganda yang digunakan untuk mengukur

pengaruh lebih dari satu variabel independent yaitu jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan inflasi terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, persamaan regresi yang diterapkan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1(POP_{it}) + \beta_2(GE_{it}) + \beta_3(INF_{it}) + e_{it}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

POP = Jumlah Penduduk (Population)

GE = Pengeluaran Pemerintah (Government Expenditure)

INF = Inflasi

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

e = error

Kemudian tiga model estimasi yang dapat digunakan yaitu:

1. Common Effect Model

Model Common Effect atau Pooled Least Squares mengasumsikan bahwa setiap individu atau entitas memiliki koefisien regresi yang sama tanpa adanya variasi antar individu (Gujarati, 2004). Model ini menganggap tidak ada perbedaan karakteristik tertentu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun pengamatan, sehingga dianggap merupakan satu kesatuan tanpa memperhitungkan heterogenitas antar wilayah atau waktu.

2. Fixed Effect Model

Model Fixed Effect adalah pendekatan yang memperhitungkan keberagaman atau heterogenitas antar individu dalam variabel independen. Model ini mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun pengamatan, sehingga model ini dapat menangkap efek yang berbeda setiap wilayah sehingga menunjukkan nilai intercept yang berbeda namun koefisien regresi variabel independen dianggap konstan.

3. Random Effect Model

Model Random Effect memperhitungkan variasi karakteristik individu dengan mengasumsikan bahwa intercept untuk setiap unit (misalnya, kota) tidak tetap, melainkan terdistribusi secara acak (random) di antara unit-unit tersebut. Model ini menganggap bahwa perbedaan tersebut muncul dari komponen random yang tidak berkorelasi dengan variabel independen, sehingga baik intercept maupun slope dapat memiliki variasi yang mencerminkan heterogenitas antar unit dalam data panel.

Dengan demikian untuk menentukan manakah model terbaik yang akan digunakan dilakukan pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM).

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan sebagai alat bantu untuk memutuskan apakah model data panel lebih tepat dianalisis menggunakan pendekatan efek tetap (Fixed Effect Model/FEM) atau model dasar yang mengabaikan perbedaan individu (Common Effect Model/CEM).

- Apabila nilai probabilitas F-statistik lebih besar dari 0,05 (5%), maka tidak ada bukti cukup kuat untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan antar entitas, sehingga CEM menjadi model yang dipilih.
- Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terdapat indikasi kuat adanya perbedaan yang signifikan antar unit observasi, sehingga FEM lebih tepat diterapkan.

2. Uji Hausman

Uji ini bertujuan untuk memilih antara dua model panel: Fixed Effect atau Random Effect (REM).

- Jika nilai probabilitas dari uji Hausman melebihi 5%, maka tidak ditemukan hubungan antara variabel independen dengan karakteristik khusus entitas, sehingga REM menjadi pilihan yang lebih sesuai.
- Namun, bila nilai probabilitasnya di bawah atau sama dengan 0,05, maka terdapat korelasi antara efek individu dan variabel bebas, dan FEM lebih dianjurkan.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk menentukan apakah model Random Effect lebih cocok dibandingkan dengan model OLS (Common Effect).

- Jika nilai statistik LM lebih kecil atau sama dengan nilai chi-square pada tingkat signifikansi 5%, maka tidak cukup bukti untuk menolak model OLS.
- Namun, jika LM lebih besar dari nilai chi-square, maka Random Effect lebih sesuai diterapkan.

Pengujian Hipotesis dalam Model Regresi

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R-squared menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel tergantung.

- Jika R^2 mendekati nol, berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat lemah.
- Jika mendekati satu, maka model memiliki kemampuan prediktif yang kuat.

2. Uji F (Simultan)

Pengujian ini mengevaluasi apakah seluruh variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel tergantung.

- H_0 : Tidak ada pengaruh simultan yang signifikan.
- H_a : Terdapat pengaruh simultan yang signifikan. Jika probabilitas F-statistik $< 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya seluruh variabel bebas secara kolektif mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh tiap variabel bebas terhadap variabel dependen secara individu.

- H_0 : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan.
- H_a : Variabel bebas berpengaruh signifikan. Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan secara parsial.

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas Residual

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa residual model menyebar normal. Metode yang digunakan adalah Jarque-Bera.

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka data tidak normal.
- Jika probabilitas $\geq 0,05$ maka data terdistribusi normal.

2. Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen memiliki hubungan korelatif yang tinggi. Jika korelasi antar variabel bebas lebih dari 0,8 maka ada indikasi multikolinearitas.

3. Heteroskedastisitas

Uji ini digunakan untuk mendeteksi apakah varians residual konsisten atau berubah-ubah di seluruh pengamatan. Metode Glejser digunakan untuk mendeteksi hal ini dengan melihat hubungan antara nilai absolut residual dan variabel bebas.

- Jika probabilitas $< 0,05$ maka terdapat heteroskedastisitas.
- Jika probabilitas $\geq 0,05$ maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan pendekatan data panel dengan memanfaatkan data dari enam kota di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Variabel terikat dalam model adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sementara variabel bebasnya terdiri dari Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi.

1. Pemilihan Model Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM)

Untuk memilih antara model Fixed Effect dan Random Effect, digunakan uji Hausman dengan bantuan software EViews 10. Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berada di bawah level signifikansi 5%. Artinya, terdapat korelasi antara efek individual dengan variabel bebas, sehingga model Fixed Effect dinyatakan lebih sesuai.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Hasil Uji	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	185.830.523	3	0.0000

Sumber: Eviews 10

2. Pemilihan Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM)

Selanjutnya dilakukan pengujian antara Common Effect dan Fixed Effect menggunakan nilai Cross-section F dan Cross-section Chi-Square. Kedua nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0,000 (kurang dari 0,05), menandakan adanya pengaruh individual dalam data. Dengan demikian, model yang dianggap paling

representatif adalah Fixed Effect Model (FEM).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Uji Efek	Statistik	d.f.	Prob.
Cross-section F	39.221806	(5,27)	0.0000
Cross-section Chi-square	76.025654	5	0.0000

Sumber: Eviews 10

Dari kedua pengujian tersebut, FEM dipilih sebagai model terbaik dalam analisis ini. Hasil estimasi dari model FEM disajikan dalam bentuk persamaan regresi berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	5.07E+13	5.54E+13	0.914345	0.3674
POP (Jumlah Penduduk)	2.64E+08	91476692	2.881994	0.0070
GE (Pengeluaran Pemerintah)	35.86976	11.47737	3.125260	0.0038
INF (Inflasi)	-3.05E+12	8.61E+12	-0.354005	0.7257

Sumber: Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi panel data pada tabel di atas, dengan menggunakan metode Fixed Effect Model (FEM) diperoleh hasil persamaan

$$PADit = \beta_0 + \beta_1(POPit) + \beta_2(GEit) - \beta_3(INF it) + eit$$

$$PADit = 5.07E13 + 2.64E + 08POP + 35.86976GE - 3.05E + 12INF$$

Persamaan regresi panel data di atas menunjukkan bahwa:

1. Koefisien sebesar 5.07E+13 menunjukkan nilai PAD ketika semua variabel independen dianggap konstan.
2. Probabilitas 0,0070 (di bawah 5%) menandakan bahwa variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien positif sebesar 2,64E+8 menunjukkan bahwa kenaikan jumlah penduduk 1% berpotensi menaikkan PAD sebesar 2,64E+8 persen, ceteris paribus.
3. Dengan nilai probabilitas 0,0038 (kurang dari 5%), variabel ini juga signifikan secara statistik. Koefisien regresi sebesar 35,86976 mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% dapat meningkatkan PAD sebesar 35,87%.
4. Nilai probabilitas 0,7257 (di atas 5%) menunjukkan bahwa inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Koefisien negatif sebesar -3,05E+12 menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% diperkirakan akan mengurangi PAD, meski secara statistik tidak signifikan.

Uji Hipotesis

1. Uji R² (Koefisien Determinan)

Untuk mengetahui sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen, digunakan nilai koefisien determinasi (R²):

Tabel 5. Hasil Uji R²

Variabel	Koefisien
R – squared	0.979049

Sumber: data sekunder, diolah Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi model regresi, diperoleh nilai R² sebesar 0,979049. Artinya, sebesar 97,90% variasi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh faktor jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan inflasi. Sisanya, yaitu 2,10%, berasal dari variabel lain yang tidak tercakup dalam model ini.

2. Uji F Simultan

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh secara kolektif terhadap variabel terikat. Hasil uji menunjukkan nilai F-statistik sebesar 157.7168 dengan probabilitas 0.000000, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hal ini menandakan bahwa ketiga variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Uji t Parsial

Uji t digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individu terhadap variabel dependen

Tabel 6. Hasil Uji t Parsial

Variabel	$\alpha = 5\%$ t tabel	t hitung
POP (Jumlah Penduduk)	1.69236 <	13.89807
GE (Pengeluaran Pemerintah)	1.69236 >	1.076858
INF (Inflasi)	1.69236 >	0.341191

Sumber: data sekunder, diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa:

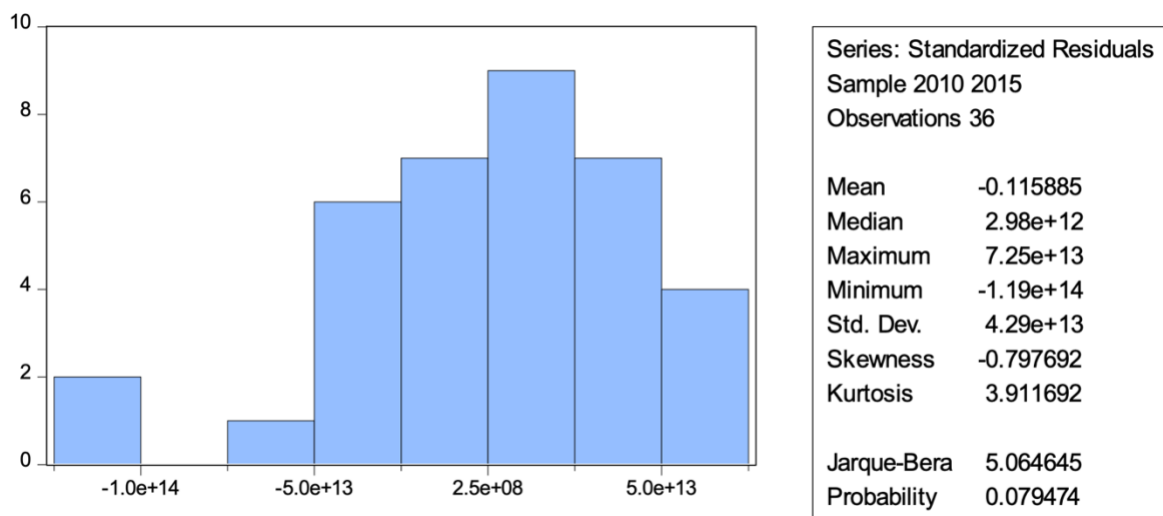
1. Jumlah penduduk dan pengeluaran pemerintah memiliki nilai probabilitas di bawah 5%, yang berarti keduanya memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.
2. Inflasi memiliki nilai probabilitas di atas ambang signifikansi, menunjukkan bahwa secara parsial, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Terdapat tiga jenis uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Untuk memastikan bahwa residual dari model berdistribusi normal, dilakukan uji Jarque-Bera. Hasil dari uji normalitas adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Uji Normalitas

Sumber: data sekunder diolah Eviews 10

Hasil uji menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,079474, lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa residual dalam model ini mengikuti distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya hubungan yang kuat antar variabel independen, digunakan matriks korelasi. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	LOG(POP)	LOG(GE)	INFLASI
LOG(POP)	1.0000	0.6748126908570898	0.0569773979072902
LOG(GE)	0.674812690857098	1.0000	0.072256167881799
INFLASI	0.05697739790729062	0.07225616788179959	1.0000

Sumber: data diolah, Eviews 10

Hasil uji di atas menunjukkan bahwa semua nilai korelasi antara jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan inflasi berada di bawah 0,8. Ini berarti tidak ditemukan adanya masalah multikolinearitas dalam model.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Glejser dilakukan untuk melihat apakah terdapat gejala heteroskedastisitas, yakni ketidaksamaan varians residual. Pengujian dilakukan dengan mengestimasi regresi menggunakan nilai

absolut dari residual sebagai variabel dependen. Pengujian menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glesjer

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
POP (Jumlah Penduduk)	2.83E+08	5.43E+08	0.521158	0.6065
GE (Pengeluaran Pemerintah)	0.267055	2.947353	0.090609	0.9285
INF (Inflasi)	2.29E+12	1.96E+12	1.167919	0.2530

Sumber: data sekunder, diolah Eviews 10

Dapat diketahui variabel Jumlah penduduk (probabilitas 0,6065), Pengeluaran Pemerintah (probabilitas 0,9285), dan Inflasi (probabilitas 0,2530). Ketiga nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model yang digunakan.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak EViews 10 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk (POP) memiliki koefisien regresi sebesar $2,64 \times 10^8$. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% cenderung diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $2,64 \times 10^8$ persen. Koefisien positif tersebut menandakan hubungan yang searah antara pertambahan penduduk dan PAD. Selain itu, uji t parsial memperlihatkan nilai t-hitung untuk variabel jumlah penduduk sebesar 13,89807, yang melebihi nilai t-tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu 1,69236. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara individual, jumlah penduduk memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk yang didukung oleh kemajuan teknologi dapat meningkatkan tabungan masyarakat dan berdampak pada skala ekonomi produksi. Kenaikan jumlah penduduk biasanya memicu peningkatan konsumsi, yang pada gilirannya mendorong ekspansi produksi. Situasi ini sering membuka peluang usaha baru dan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sehingga pendapatan masyarakat meningkat dan berkontribusi pada peningkatan PAD. Selain itu, aktivitas ekonomi penduduk, termasuk pembayaran pajak dan retribusi, juga menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan produksi atau mendirikan unit usaha baru guna memenuhi kebutuhan pasar, yang pada gilirannya membuka lapangan kerja lebih luas dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar. Peningkatan jumlah tenaga kerja berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat, yang akhirnya akan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi sumber penting bagi pendapatan daerah, seperti melalui pungutan pajak daerah maupun retribusi jasa pelayanan publik.

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis untuk variabel Pengeluaran Pemerintah (GE) menunjukkan koefisien regresi sebesar 35,86976. Artinya, kenaikan pengeluaran pemerintah sebesar 1% diperkirakan akan mengakibatkan peningkatan PAD sebesar 35,86976%. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah berkorelasi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, hasil uji t parsial memperlihatkan nilai t-hitung sebesar 1,076858, yang lebih rendah dari t-tabel pada tingkat signifikansi 5% sebesar 1,69236. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, meskipun secara simultan variabel ini tetap memberikan kontribusi yang bermakna bersama variabel independen lainnya.

Kendati demikian, meskipun tidak signifikan secara individual, variabel pengeluaran pemerintah tetap memiliki kontribusi penting dalam menjelaskan variasi PAD ketika dilihat secara simultan bersama variabel independen lainnya. Hal ini tercermin dalam hasil uji F sebelumnya yang menyatakan bahwa keseluruhan model, termasuk pengeluaran pemerintah, signifikan dalam menjelaskan perubahan PAD. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mangkoesobroto (1998), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan daerah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator dan katalisator untuk mendukung adanya pembangunan seperti infrastruktur, dll. sehingga membutuhkan anggaran belanja. Dengan meningkatnya belanja daerah dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah, maka pembangunan suatu daerah semakin berkembang sehingga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel inflasi tercatat sebesar $-3,05 \times 10^{12}$, yang menandakan bahwa setiap kenaikan tingkat inflasi sebesar 1% diperkirakan menurunkan PAD sebesar angka tersebut. Koefisien negatif ini menunjukkan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan PAD, yang berarti jika inflasi naik, PAD cenderung menurun. Namun, berdasarkan uji t parsial, nilai t-hitung untuk

inflasi adalah 0,341191, yang lebih kecil daripada t-tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu 1,69236. Dengan demikian, secara parsial inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD di enam kota Provinsi Jawa Tengah.

Hubungan negatif antara inflasi dan PAD ini dapat dijelaskan melalui perilaku masyarakat saat inflasi terjadi. Secara teori, inflasi diperkirakan berdampak positif terhadap PAD karena kenaikan harga barang dan jasa turut meningkatkan besarnya pajak yang diterima pemerintah. Namun, dalam praktiknya, inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ketika harga-harga terus naik, masyarakat cenderung mengurangi konsumsi, terutama untuk barang-barang sekunder dan tersier, dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan primer. Akibatnya, penerimaan pajak yang menjadi bagian dari PAD justru menurun, sehingga inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah.

Fenomena ini dapat dijelaskan karena sebagian besar barang yang dikonsumsi masyarakat tidak termasuk dalam kategori barang yang dikenakan pajak langsung oleh pemerintah daerah. Selain itu, kecenderungan masyarakat berbelanja melalui toko online, yang biasanya menawarkan harga lebih murah dibandingkan toko fisik, mengakibatkan penerimaan pajak daerah berkurang. Meski demikian, pembayaran pajak tetap wajib dan cenderung tidak terpengaruh oleh fluktuasi inflasi, sehingga pengaruh inflasi terhadap PAD menjadi tidak signifikan selama periode penelitian. Temuan ini berbeda dengan pandangan Mankiw (2006) yang menyatakan bahwa inflasi berdampak terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah.

Penemuan dalam penelitian ini juga sejalan dengan hasil studi Batik (2013) yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Lombok Barat. Dalam penelitian tersebut, variabel investasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan penerimaan pembangunan terbukti berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik.

SIMPULAN

Analisis data yang dilakukan pada enam kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2011 hingga 2015 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0070, yang berada di bawah tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Koefisien regresi untuk variabel ini tercatat sebesar $2,64 \times 10^8$, yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% diperkirakan dapat mendorong peningkatan PAD sebesar $2,64 \times 10^8$ persen, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Sementara itu, variabel pengeluaran pemerintah juga menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD, dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0038, yang juga berada di bawah batas signifikansi 5%. Koefisien regresi sebesar 35,86976 menandakan bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1%, maka PAD diproyeksikan akan naik dengan persentase yang sama, selama faktor-faktor lain tidak berubah.

Berbeda halnya dengan variabel inflasi. Nilai probabilitas untuk inflasi tercatat sebesar 0,7257, yang jauh melebihi tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara statistik inflasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD. Meskipun demikian, nilai koefisien regresi yang negatif, yakni sebesar $-3,05 \times 10^{12}$, menunjukkan bahwa inflasi cenderung memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan PAD, meskipun dampaknya tidak signifikan dalam konteks penelitian ini. Adapun salah satu keterbatasan dalam studi ini adalah periode waktu yang relatif singkat, yakni hanya mencakup lima tahun. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan mencakup rentang waktu yang lebih panjang agar hasil analisis yang diperoleh dapat lebih representatif, mendalam, dan akurat dalam menggambarkan dinamika hubungan antar variabel tersebut terhadap PAD.

REFERENSI

- Adriani, E., & Handayani, S. I. (2008). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 8(2), 1–6.
- Anata. (2008). Analisis Kependudukan. Erlangga. Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1).
- Ekananda, M. (2006). Analisis Data Panel: Estimasi dengan Struktur Varian Kovarian Residual. Universitas Indonesia.
- Gujarati, D. (2004). *Basic Econometrics (Ekonometrika Dasar)*. Erlangga. Indonesia, P. (2004a). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia, P. (2004b). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Kusuma, A. (2015). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati. Universitas Surakarta.

- Mangkoesebroto, G. (1998). *Ekonomi Publik*, Edisi 3 (3rd ed.). BPFE.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi*. Erlangga.
- Nachrowi, D. N., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit FE Ui.
- Simanjuntak. (2011). *Kependudukan*. BPFE.
- Sukirno, S. (2004). *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta Press.
- Widjaja. (1992). *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*. PT. Raja Grafindo Persada.